



Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLM, PhD

• Ketua Ombudsman Republik Indonesia- 2016-2021

• Ketua Dewan Pimpinan Pusat

Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)- 2018-2023

• Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya- Sejak 2005

RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

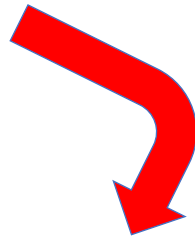
1. *Owner* ARF-Indonesia Consulting Group (Non aktif)
2. Konsultan Pemerintah Daerah dan DPRD (Non-Aktif)
3. Ketua Program S2 dan Program S3 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, 2003 s.d 2009
4. Dekan Fakultas Hukum UNSRI, 2009-2013 dan 2013-2016/ (*Resign*)
5. *Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya, 2007-2011 dan 2011-2016*
6. Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya, 2011-2016 (*Resign*)
7. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, 2016-2021
7. Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-*ISHI*, 2018-2023

RIWAYAT PENDIDIKAN

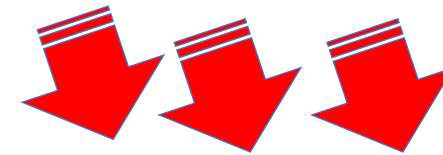
- SH, Universitas Sriwijaya-Palembang, 1988.
- Diploma Demography, FE-UI, Jakarta, 1990.*
- Master Ilmu Hukum, Melbourne University, Australia, 1995.
- Ph.D. Ilmu Hukum, Monash University, Australia, 2002.*

PEMBICARA/ PENUGASAN LUAR NEGERI:

- *Strasbourg-Perancis, 1996,*
- *Oxford University - Inggris, 1997*
- *Birmingham University -Inggris, 1998,*
- *Lund University-Swedia, 2003,*
- *Pretoria University - Afrika Selatan, 2004,*
- *IBA-New York,USA, 2012,*
- *IBA- Toronto-Canada, 2014,*



- *Tokyo-Japan, 2016*
- *Melbourne-Australia, 2016,*
- *Kazan-Russia, 2016,*
- *Tashkent-Uzbekistan, 2016,*
- *Bangkok-Thailand, 2016*
- *Observer PILPRES Uzbekistan,2016*
- *Ankara, TURKI, 2017,*



- *Sydney, AUSTRALIA, 2017*
- *St. Petersburg, RUSSIA, 2018*
- *Taipei, Taiwan, 2018,*
- *Bangkok-Thailand, 2019,*
- *Taipei, Taiwan, 2019,*
- *Turki, 2019*

PENGHARGAAN:

- 1. PELAJAR TELADAN SMP/SMA**
- 2. MAHASISWA TELADAN UNIVERITAS SRIWIJAYA**
- 3. DOSEN TELADAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- 4. PUBLICATION AWARD MELBOURNE UNIVERSITY, AUSTRALIA**

DOSEN TAMU/ PENGUJI TAMU/ VISITING SCHOLAR:

- 1.SESKO TNI (ABRI)– sejak 1997**
- 2.SESPIMTI POLRI**
- 3. Universitas Pertahanan (UNHAN)**
- 4.INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)**
- 5.PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**
- 6. Ohio University, Athens, USA**
- 7.Burapha University, Thailand**



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

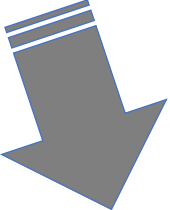
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

PUSDIK Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM-83, Bogor-JABAR
Rabu, 11 Maret 2020

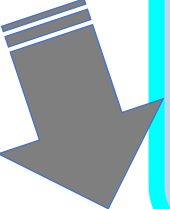
Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D

- Ketua Ombudsman Republik Indonesia
- *Ketum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-ISHI*
- Guru Besar Universitas Sriwijaya


TIGA Peran Negara Dalam Menjamin Hak-hak Konstitusional



1. PREVENSI: Melakukan pencegahan secara dini terhadap semua potensi sosial yang dapat memunculkan pelanggaran HAM
(MELALUI UNDANG-UNDANG)



2. PROTEKSI: Memberikan perlindungan kpd semua komponen Masyarakat warga yang rentan menjadi sasaran pelangg HAM
(MELALUI LEMBAGA)



3. Promosi : Melakukan sosialisasi setiap kovenan yang berkaitan dengan HAM pada semua sektor masyarakat
(MELALUI KAMPANYE/DIKLAT)

POKOK BAHASAN

- PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA
- PERKEMBANGAN HAM SECARA INTERNASIONAL
- INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM SECARA INTERNASIONAL
 - PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945
- TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAM

1. Perkembangan Konsep HAM

1. Hukum ALam (*natural law*);
2. Magna Charta (1215); penghilangan hak absolutisme raja; yang menginspirasi lahirnya *Bill of Right* di Inggris (1689) bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*);
3. Lahirlah kemudian teori *kontrak sosial* (JJ. Rosseau), Trias Politika (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke)
4. *The American Declaration of Independence*, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelunggu;

5. *The French Declaration* (1789); dimuat dalam *The Rule of Law* antara lain: tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, tanpa alasan, dsb; berlakulah prinsip *presumption of innocent*; bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah.

- Dipertegas dengan *freedom of expression; freedom of religion, the right of property.*

6. *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt (6 Januari 1941):

- Hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat;
- Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya;
- Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya; dan
- Hak kebebasan dari ketakutan, dalam bentuk apapun.

7. *Deklarasi Philadelphia* (1944) dalam Konferensi Buruh Internasional: usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dsb serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat;

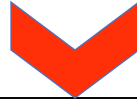
8. LAHIRLAH *The Universal Declaration of Human Right* PBB (1948)

2. PERLINDUNGAN HAM SECARA INTERNASIONAL

Human Rights – International Law



Declaration/Recommendation/Code of Conduct
(Statement of Institution/ Moral Binding) – No Ratification



Customary Law (Binding/Consistently followed)



Treaty/ Covenant/ Convention/ Charter/ Agreement/ Protocol
(is a contract and Legally Binding)



Protocol: Additional to the Treaty/The Same as Treaty

International Law Part of National Law (US and S. Africa)



Treaties:

1. Ratification 2. Ratification with Reservation 3. Not ratify



Humanitarian Law: HRs apply during War (POW)



Refugees Law: Extending Protection to Asylum Seekers & Ref.

UN-Human Rights Conventions

ICESCR (Economic, Social and Cultural Rights)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICCPR (Civil and Political Rights)

International Covenant on Civil and Political Rights

ICERD (Racial Discrimination)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

CAT (Prevention of Torture)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment

CEDAW (Women's Rights)

Convention on the Elimination of Discrimination against Women

CRC (Children's Rights)

Convention on the Rights of the Child

ICRMW (Migrant Workers' Rights)

International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and
Members of Their Families

CRPD (Disabled Persons)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CPED (Enforced Disappearance)

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

The Human Rights Council is an inter-governmental body within the United Nations system made up of 47 States responsible for the promotion and protection of all human rights around the globe.

The Human Rights Council is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe *and for addressing situations* of human rights violations *and* make recommendations on them.

It has the ability to discuss all thematic human rights issues and situations that require its attention throughout the year.

It meets at the UN Office at Geneva.

3. REGIONAL SYSTEM OF *HRs* PROTECTION

Among the existing regional systems of protection:

- The first and oldest one is the European system (its original treaty, called the **European Convention on Human Rights**, dates back to 1950). It has dealt with the largest number of cases of human rights violation so far.
 - The **Inter-American regional system** is the second one. It was established by the American Convention on Human Rights, in 1969.
- The third and most recent one is **the African regional system**, still very incipient, established by the African Charter on Human and Peoples' Rights, in 1981

The main element of the European system for the protection of human rights is the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 (ECHR), together with its enforcement mechanisms

THE INTER AMERICAN SYSTEM

The Inter-American system, composed of four main instruments:

1. The Charter of the Organization of American States (1948);
2. The American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948), which, *although not being technically a treaty*, outlines the rights mentioned in the Charter of the OAS;
3. The American Convention on Human Rights (1969), *known as the Pact of San Jose of Costa Rica*;
4. The Additional Protocol to the American Convention in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, *dubbed the Protocol of San Salvador (1988)*.

THE AFRICAN REGIONAL SYSTEM (AFRICAN UNION)



- To promote and protect Human and People's Rights,
 - Consolidate Democratic Institutions and Culture,
 - Ensure Good governance and the Rule of Law

4. Peran Negara Dalam Hak Asasi Manusia

1. **PREVENSI**: Melakukan pencegahan secara dini terhadap semua potensi sosial yg dpt memunculkan pelanggaran HAM
(MELALUI UNDANG-UNDANG)

2. **PROTEKSI**: Memberikan perlindungan kpd semua komponen Masyarakat warga yang rentan menjadi sasaran pelanggaran HAM
(MELALUI LEMBAGA)

3. **PROMOSI** : Melakukan sosialisasi setiap kovenan yang berkaitan dengan HAM pada semua sektor masyarakat
(MELALUI KAMPANYE)

5. PERLINDUNGAN HAM SECARA NASIONAL

HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan beberapa Peraturan Per-undang-undangan

A.Pembukaan UUD 1945 (alinea 1),

B.Pancasila sila keempat,

C.Batang tubuh UUD 1945 (Pasal 27,29 dan 30)

D.UU Nomor 39/1999 tentang HAM

E.UU Nomor: 26/2000 tentang Pengadilan HAM

F.KONVENSI yang Indonesia sebagai *STATE PARTY*



Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Pasal 27 (hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi)

Pasal 28 (hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan)

Pasal 28 (A-J)

Pasal 29 (mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing)

Pasal 31 (mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran)

Pasal 32 (mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya)

Pasal 33 (mengakui hak memiliki dan menikmati kekayaan Indonesia)

Pasal 34 (mengatur hak asasi dibidang kesejahteraan sosial)

Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945

Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR)

Upaya Perlindungan HAM dalam Konvensi Internasional

Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999

1. Convention on The Elimination of Discrimination Against Women diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984
2. Convention on the Prohibition of The Development, Production, and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Their Destruction) diratifikasi dengan Keppres No. 58 tahun 1991.
3. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (UU No. 59 tahun 1928.
4. Convention on The Rights of the Child) diratifikasi dengan Keppres No. 36 tahun 1990.
5. Convention on The Political Rights of Women diratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958.

6. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No. 48/1993).
7. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No. 29/1999)
8. Convention Against Torture and Other Cruet, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UU No. 5/1998)
9. ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection on The Rights to Organise (UU No. 83/1998).
10. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (24 Sepetember 2001)
11. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of the Children in Armed Conflict (24 September 2001).
12. The International Covenant on Civil and Political Rights (UU No. 12/2005)
13. The International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights/ ICESCR, (UU No. 11/2005).
14. International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism, ditandatangani pada 24 September 2001.

PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

- Secara Konstitusional, HAM telah diatur dengan cukup baik dalam UUD 1945 **bahkan** lebih awal dari UDHR
- Indonesia juga menjadi bagian (state party) dari berbagai instrumen Hukum Internasional bidang HAM
- Indonesia juga memiliki lembaga/ institusi serta produk hukum yang memberikan proteksi kepada HAM

Problem mendasar:

Pelaksanaan HAM di Indonesia belum menjadi sendi-sendi dasar dalam berkehidupan dan bernegara (Mestinya menjadi acuan bagi semua penyelenggara negara dan masyarakat)

HAM belum menjadi kultur baik bagi masyarakat maupun bagi aparat

KESIMPULAN

ADA MEKANISME GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL PERLINDUNGAN HAM

INDONESIA MEMILIKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN PROTEKSI TERHADAP NILAI-NILAI HAM

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 SECARA TEGAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARANYA *MENJADI KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA/PEMERINTAHAN dan MASYARAKAT BAGI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM*

Terima Kasih